BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi berubahnya kondisi ekonomi yang kurang baik meningkat manjadi lebih baik terhitung setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan negara. Pertumbuhan ekonomi juga ditandai dengan naiknya Peoduk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan suatu keberhasilan pembangunan , karena tanpa pertumbuhan ekonomi pembangunan ekonomi tidak ada artinya. Pertumbuhan ekonomi juga merangsang dan meningkatkan integrasi ekonomi di daerah-daerah (Dobrescu & Dobre, 2014)

Indonesia merupakan negara berkembang dengan wilayah sangat luas. Akibatnya Indonesia masih kesulitan mengatur pembagunan ekonomi diseluruh daerah-daerah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak berkembang dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang kepada Pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai potensi daerahnya sendiri atau yang sekarang kita menyebutnya Otonomi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Anonim, 2014), bahwa "Otonomi Daerah adalah hak , wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."(Anonim, 2014)

Perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga jenis perencanaan,diantaranya :

1. Berdasarkan proses, perencanaan jenis ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu *Bottom-up* dan *Top-down*
2. Berdasarkan dimensi pendekatan, perencanaan jenis ini dibagi menjadi 4 diantaranya perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional yang menitikberatkan pada aspee lokasi dimana kegiatan dilakukan, perencanaa mikro .
3. Berdasarkan jangkauan jangka waktu , perencanaan jenis ini dibagi menjadi 3 yaitu Rencana Pembagunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) , Rencana jangka pendek

   (Murti, 2013)

Pada umumnya pembangunan ekonomi lebih condong pada pertumbuhan ekonomi semata daripada pemerataan pembangunan ekonomi. Dampak dari tidak meratanya pembangunan adalah adanya daerah tertinggal dan kesejahteraan masyakaratnya kurang. Akibat kurang meratanya pembangunan ekonomi menyebabkan beberapa sektor-sektor potensial penyumbang PDRB kurang berkembang bahkan tidak berkembang.

Tujuan dari pembangunan suatu daerah sediri salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik apabila sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi kita melihat beberapa daerah di Indonesia dalam membangun daerahnya tidak sesuai dengan keunggulan atau spesialisasi dari

daerahnya yang mengakibatkan daerahnya menjadi kurang berkembang atau bahkan dikatakan tertinggal dengan daerah yang lain, dalam artian daerah tersebut tidak maju karena kurang tepatnya pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, sehingga sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi Sektor penunjang ekonomi daerah tersebut malah tidak terurus dan mengakibatkan turunnya dari PDRB daerah tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini pemerintah Indonesia lebih mendorong sektor Industri untuk memimpin sektor lain yang mengakibatkan sektor-sektor potensial kurang berkembang baik bahkan tidak bisa berkembang. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi di beberapa daerah kurang merata, selain itu dalam konteks spasial (konteks ruang) terbatasnya sumber pembangunan (akibat pembangunan yang kurang merata) membuat pemerintah daerah menentukan kebijakan pembangunan dengan menentukan daerah tertentu menjadi pusat pertumbuhan yang mengakibatkan perekonomian lebih terpusat (teraglomerasi) ke daerah perkotaan sehingga *trickle down effect* tidak dapat tercipta. (Robingatun, 2013)

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke daerah (desa). Dan membuat kurang berkembangnya daerah tersebut bahkan dapat mempengaruhi PDRB daerah tersebut karena pertumbuhan ekonomi yang kurang merata.(Robingatun, 2013)

Pulau Jawa merupakan Pulau dengan pembangunan ekonomi termaju di Indonesia. Akan tetapi di Pulau Jawa walaupun tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi termaju diantara pulau besar lainnya di Indonesia beberapa

provinsi di Pulau Jawa pembangunannya masih belum bisa dikatakan merata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi yang ada di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010

Provinsi	**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen)**							
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
DKI JAKARTA	6.73	6.53	6.07	5.91	5.91	5.87	6.20	6.17
JAWA BARAT	6.50	6.50	6.33	5.09	5.05	5.66	5.35	5.64
JAWA TENGAH	**5.30**	**5.34**	**5.11**	**5.27**	**5.47**	**5.25**	**5.26**	**5.32**
DI YOGYAKARTA	5.21	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05	5.26	6.20
JAWA TIMUR	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44	5.57	5.46	5.50
BANTEN	7.03	6.83	6.67	5.51	5.45	5.28	5.73	5.81

(https://www.bps.go.id, n.d.)

Menurut data dari Badan Pusat Statistika bahwa laju Pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan *flat* (datar) dan termasuk paling rendah di tahun 2018 dibandingkan 5 Provinsi lainnya di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten) dari data tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah berjalan kurang maksimal.

Jawa Tengah terkenal dengan budaya adat jawa yang sangat kental , Jawa Tengah juga terkenal dengan kaya potensi Sumber Daya Alam yang melimpah. Bahkan bisa dikatakan tanah di Jawa Tengah sangat subur dibanding Provinsi

Jawa Timur. Akan tetapi dengan kekayaan Jawa Tengah yang sangat melimpah seperti itu pembangunan di Jawa Tengah termasuk masih tertinggal. Bahkan tidak sedikit daerah di Jawa Tengah masuk dalam daerah tertinggal atau daerah miskin. Pemerataan pembangunan yang ada di Jawa Tengah sangat memerlukan perhatian dari pemerintah daerah setempat (dikarenakan sudah diterapkan adanya desentralisasi).

Secara umum tingkat perekonomian di Jawa Tengah khususnya wilayah bagian Tengah relatif masih tertinggal jika dibandingkan dengan Jawa Tengah bagian Utara. Kurangnya pemerataan pembangunan di Jawa Tengah yang mengakibatkan rendahnya tingkat perekonomian Jawa Tengah dibanding provinsi yang lain bahkan tingkat kesejahteraan Jawa Tengah yang terbilang rendah.

Demi meningkatkan pembangunan daerah dan peningkatan perekoniman serta PDRB, Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengambil suatu kebijakan strategis dengan membagi beberapa wilayah yang dijadikan sebuah kawasan yang berfungsi sebagai kerjasama antar daerah untuk pertumbuhan ekonomi antar daerah tersebut, sehingga perkembangan ekonomi diharapkan bisa berkembang pesat. Kebijakan tersebut tertuang kedalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Anonim, 2010)

Wilayah-Wilayah yang sudah dikelompokan adalah wilayah KEDUNGSEPUR (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga dan Grobogan) , WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus, Pati), SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta dan sekitarnya, Boyolali,

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten), BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang), PETANGLONG (Kabupaten Pekalongan, Batang, Kota Pekalongan), BARLINGMASCAKEP (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung), BANGLOR (Rembang dan Blora) . Pembangian daerah tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam permerataan pembangunan ekonomi, yang salah satu masuk diantara sistem wilayahnya adalah PURWOMANGGUNG (Purworejo Wonosobo Magelang Temanggung) (Anonim, 2010)

Perbandingan laju pertumbuhan tiap kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah digambarkan dengan diagram batang sebagai berikut :

Gambar 1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018

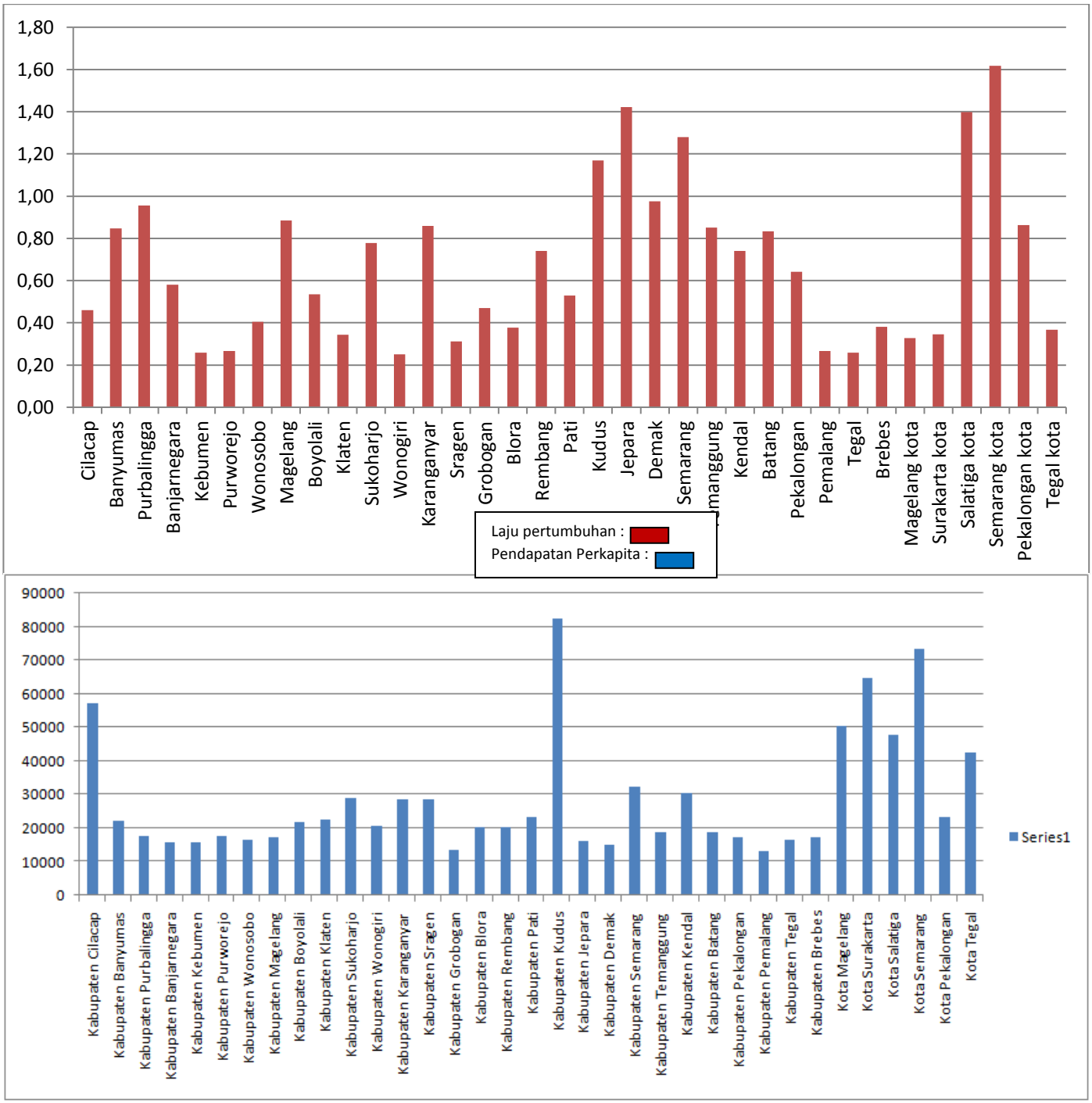

(https://www.jateng.bps.go.id, n.d.)

Secara tipologi penduduk, bahwa laju pertumbuhan yang tinggi mempengaruhi pendapatan perkapita yang tinggi. Namun hal ini tidak berlaku di Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan perkapita penduduk.hal ini pula yang didasari kentalnya budaya adat istiadat masyarakat Provinsi Jawa Tengah yaitu berkecukupan sehingga dari budaya tersebut masyarakat Jawa Tengah tidak terlalu mempermasalahkan jumlah besaran pendapatan perkapita masyarakat. Sehingga keseimbangan antara pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi tidak seimbang (Gambar 1.1)

Pada dasarnya terdapat beberapa permasalahan dari PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung) itu sendiri. Ke empat daerah ini mempunyai lokasi yang sangat strategis di Jawa Tengah dengan kekayaan Sumber Daya Alam Yang melimpah akan tetapi empat daerah ini masuk ke dalam daftar daerah dengan laju pertumbuhan rendah di Jawa Tengah (ditunjukan gambar 1.1) .

Secara tipologi penduduk, bahwa laju pertumbuhan yang tinggi mempengaruhi pendapatan perkapita yang tinggi. Namun hal ini tidak berlaku di Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu berpengaruh terhadap

Kabupaten Purworejo, berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Purworejo sangat diuntungkan dengan letak daerahnya yang strategis. Tapi tingkat laju pertumbuhan PDRB Purworejo masih terbilang rendah (ditunjukan gambar 1.1) , hal ini mengindikasikan perkembangan perekonomian Kabupaten Purworejo belum maksimal.

Secara umum Daerah Wonosobo sangat didukung iklim yang bagus dengan keadaan geografis yg dikeliling pegunungan aktif dengan kata lain tanah di Wonosobo terbilang sangat subur diantar 3 daerah yang lain (Purworejo , Magelang, Temanggung) yang mebuat Wonosobo sangat diuntungkan secara lokasi. Dalam sejarah perkembangannya , Wonosobo menjadi Kawasan Produksi Pertanian di Jawa Tengah. Akan tetapi letak yang strategis dan pertanian yg baik belum mampu mengangkat laju pertumbuhan Wonosobo (ditunjukan pada gambar 1.1). Berikut ini merupakan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukan tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2008-2018

Wilayah Jateng	2018	Wilayah Jateng	2018
Kabupaten Cilacap	11.25	Kabupaten Kudus	6.98
Kabupaten Banyumas	13.50	Kabupaten Jepara	7
Kabupaten Purbalingga	15.62	Kabupaten Demak	12.54
Kabupaten Banjarnegara	15.46	Kabupaten Semarang	7.29
Kabupaten Kebumen	17.47	Kabupaten Temanggung	9.87
Kabupaten Purworejo	11.67	Kabupaten Kendal	9.84
Kabupaten Wonosobo	**17.58**	Kabupaten Batang	8.69
Kabupaten Magelang	11.23	Kabupaten Pekalongan	10.06
Kabupaten Boyolali	10.04	Kabupaten Pemalang	16.04
Kabupaten Klaten	12.96	Kabupaten Tegal	7.94
Kabupaten Sukoharjo	7.41	Kabupaten Brebes	17.17
Kabupaten Wonogiri	10.75	Kota Magelang	7.87
Kabupaten Karanganyar	10.01	Kota Surakarta	9.08
Kabupaten Sragen	13.12	Kota Salatiga	4.84
Kabupaten Grobogan	12.31	Kota Semarang	4.14
Kabupaten Blora	11.90	Kota Pekalongan	6.75
Kabupaten Rembang	15.41	Kota Tegal	7.81
Kabupaten Pati	9.90	PROVINSI JAWA TENGAH	11.32

(https://www.jateng.bps.go.id, n.d.)

Menurut Tabel 1.2 dapat dilihat persentase kemiskinan di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Sektor pertanian yang digadang-gadang oleh Pemerintah Daerah Wonosobo nyatanya tidak cukup mengangkat Wonosobo dari kemiskinan, hal ini menunjukkan pembangunan ekonomi Wonosobo tidak berjalan dengan semestinya.

Dari data kemiskinan pada tabel 1.2 bisa disimpulkan bahwa tingkat pemerataan pembangunan ekonomi di Wonosobo sangat kurang. Dari data-data tersebut Wonosobo dapat dikatakan merupakan kabupaten tertinggal jika dibanding 3 daerah lainnya (Purworejo, Magelang, Temanggung).

Magelang adalah sebuah daerah yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yokyakarta. Magelang dibagi menjadi 2 bagian yaitu Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Secara letak geografis Magelang sangat diuntungkan karena daerahnya dikelilingi oleh rangkaian pegunungan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara kekayaan pariwisata Magelang identik dengan Candi Borobudur peninggalan Kerajaan Mataram Kuno bahkan tidak pernah sepi dikunjungi oleh wiatawan

Sedangkan Kota Magelang merupakan pusat perekonomian kawasan kerjasama PURWOMANGGUNG. akan tetapi Kota Magelang sebagai pusat dari perekonomian PURWOMANGGUNG tidak bisa memaksimalkan pemerataan ekonomi yang ada di kawasan kerjasama PURWOMANGGUNG, sehingga interaksi ekonomi tiap daerah tidak berjalan secara baik karena Kota Magelang tidak tumbuh dab berkembang sesuai harapan. Dari hal tersebut mengakibatkan

perekonomian di kawasan kerjasama PURWOMANGGUNG tidak berjalan dengan baik sesuai harapan.

Hanya mengandalkan nama Candi Borobudur nyatanya masih belum mampu membantu menaikan PDRB Magelang. Pada faktanya sampai saat ini perkembangan ekonomi di Daerah Magelang berjalan kurang merata dan hanya terpusat pada Kota Magelangnya saja . (Prishardoyo, 2008)

Temanggung salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Magelang. sama halnya dengan Wonosobo Kawasan Temanggung kaya akan sumber daya alam . Daerah yang di kelilingi rangkaian pegunungan membuat tanah Temanggung menjadi subur akan tanaman yang ditanami di Temanggung. Namun hingga saat ini laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung termasuk rendah (ditunjukan gambar 1.1) . Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Temanggung masih kurang berkembang atau kurangnya pemerataan dan pembangunan ekonomi.

Dari berbagai daerah di Jawa Tengah (kabupaten maupun kota) yang laju pertumbuhan rendah dan PDRB rendah peneliti memilih 5 Kabupaten sebagai fokus utama penelitian dikarenakan PURWOMANGGUNG ini (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung) ini mempunyai lokasi strategis bahkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah akan tetapi 5 daerah (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung) ini masuk kedalam daerah dengan laju petumbuhan ekonomi rendah bahkan dengan segala kelebihan daerah tersebut, PDRB dan laju pertumbuhan yang dihasilkan PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung) masih rendah.

Dari penjabaran diatas penulis tertarik meneliti darerah Purworejo, Magelang, Wonosobo dan Temanggung yang diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi dan perkembangan ekonomi di masa mendatang daerah PURWOMANGGUNG untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai era otonomi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah beberapa tahun penetapan pembagian dan pengelompokan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan niatan untuk mengangkat PDRB dan pemerataan Sumber Daya Alam untuk pertumbuhan ekonomi , hingga sampai tahun 2019 ini perubahan yang diperoleh tidak terlalu terlihat secara kasat mata. Hal ini diakibatkan karena belum optimalnya pembangunan ekonomi dari PURWOMANGGUNG sendiri. Berdasarkan daari latar belakang diatas , dapat dijabarkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain ;

a. Apakah ada perkembangan sektor ekonomi PURWOMANGGUNG dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018?
b. Apakah ada Sektor ekonomi potensial yang bisa dikembangkan menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di PURWOMANGGUNG
c. Apakah ada perkembangan ekonomi PURWOMANGGUNG dari tahun 2019 sampai dengan 2023 (5 tahun) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui :

a. Menganalisis perkembangan sektor ekonomi PURWOMANGGUNG dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018
b. Menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial dikembangkan menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di PURWOMANGGUNG

c. Mengidentifikasi perkembangan ekonomi PURWOMANGGUNG dari tahun 2019 sampai dengan 2023 (5 tahun)

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagai peneleliti manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

b) Bagi Civitas Akademik, penelitian ini diharapkan menjadi konstribusi ilmu pengetahuan dan sumbangsih ilmu pengetahuan maupun refrensi bagi penelitian selanjutnya dimasa mendatang khususnya peneletian di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

c) Bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi untuk mengkaji kembali masalah kebijakan dalam pembangunan ekonomi tiap-tiap daerah,sehingga bisa menjadi bahan masukan dalam mebuat kebijakan yang menyangkut kepada pembangunan ekonomi Purworejo, Wonosobo, Magelang, dan Temanggung